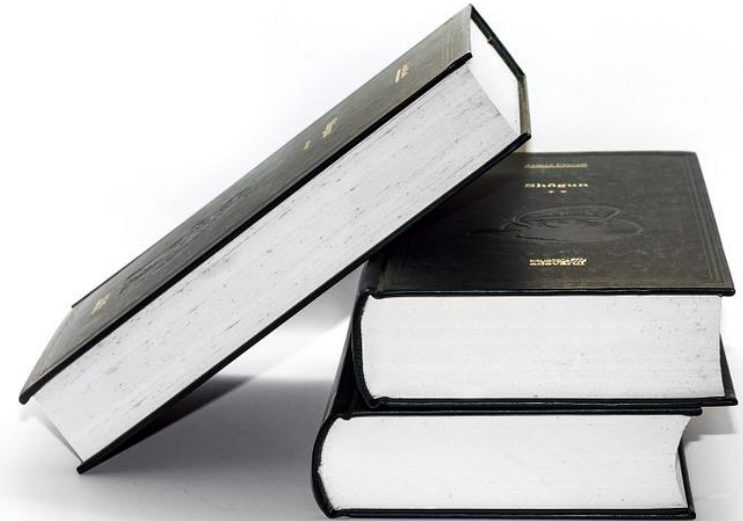


# IJIN LUAR NEGERI PEJABAT NEGARA ALASAN PENTING BAGI PEJABAT NEGARA & DPRD PROVINSI, KAB/KOTA

## DASAR HUKUM

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 116 TAHUN 2003 TENTANG  
PEMBERIAN IZIN KELUAR NEGERI DENGAN  
ALASAN PENTING BAGI PEJABAT NEGERA  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI,  
KABUPATEN/KOTA.





# PERSYARATAN

Download from  
Dreamstime.com  
©2018  
Pakoni Pngkitri - Dreamstime.com

## **IZIN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN AGAMA**

1. SURAT BUKTI PENDAFTARAN SEBAGAI PESERTA IBADAH HAJI YANG DILAKUKAN OLEH JASA PERJALANAN HAJI/UMROH BAGI AGAMA ISLAM;
2. SURAT BUKTI PENDAFTARAN BAGI PESERTA PERJALANAN RELIGI OLEH JASA PERJALANAN AGAMA DILUAR AGAMA ISLAM;
3. SURAT PERNYATAAN BIAYA PERJALANAN KE LUAR NEGERI DIBIYAI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DAN KETUA/WAKIL KETUA/ANGGOTADPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG BERSANGKUTAN.



# IZIN BEROBAT

SURAT KETERANGAN DARI DOKTER YANG MEREKOMENDASI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DAN KETUA/WAKIL KETUA/ANGGOTA DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA HARUS MELALUKAN PENGOBATAN KE RS DI LUAR NEGERI,

2. SURAT PERNYATAAN PERJALANAN KE LUAR NEGERI DIBIYAI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DAN KETUA/WAKIL KETUA/ANGGOTA DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG BERSANGKUTAN.



# IZIN KEPERLUAN KELUARGA

1. SURAT KETERANGAN DOKTER DARI RS LUAR NEGERI YANG MENYATAKAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA DAN KETUA/WAKIL KETUA/ ANGGOTA DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DALAM PERAWATAN;
2. BUKTI UNDANGAN RESMI DARI PERGURUAN TINGGI YANG MENYATAKAN KEPADA GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA DAN KETUA/WAKIL KETUA/ANGGOTA DPRD PROPINSI/KABUPATEN/KOTA ATAS PELAKSANAAN WISUDA ANAK DI LUAR NEGERI;
3. BUKTI UNDANGAN PERNIKAHAN ANAK GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI,WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DAN KETUA/WAKIL KETUA/ANGGOTA DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI LUAR NEGERI;
4. SURAT PERNYATAAN PERJALANAN KE LUAR NEGERI DIBIYAI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR,IZIN UNTUK KEPERLUAN KELUARGA:BUPATI/WAKIL BUPATI, WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DAN KETUA/WAKIL KETUA/ANGGOTA DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG BERSANGKUTAN



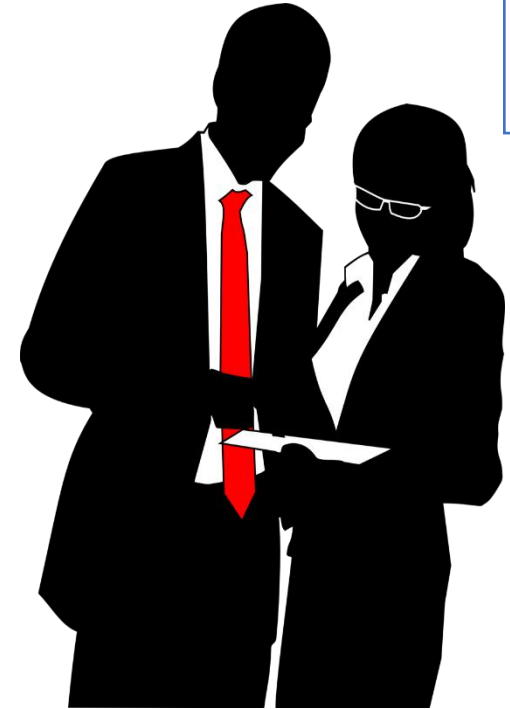
# **PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD PROVINSI**

## **DASAR HUKUM**

1. UU NO. 17/2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD;
2. PP NO. 16/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD;
3. KEPUTUSAN MENDAGRI NO. 061-8087 TAHUN 2013 TANGGAL 31 DESEMBER 2013 TENTANG PENETAPAN NAMA DAN KODE SOP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

# PROSEDUR PENGAJUAN

1. SURAT USULAN PAW DARI GUBERNUR KEPADA MENTERI DALAM NEGERI.
2. MENTERI DALAM NEGERI CQ. DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH MENERIMA DAN MENELAAH USULAN DARI GUBERNUR.
3. PROSES PENELAAHAN DARI ASPEK HUKUM DI BIRO HUKUM, DAN JIKA SUDAH SESUAI, DILANJUTKAN UNTUK PERMOHONAN TANDA TANGAN MENTERI DALAM NEGERI
4. SALINAN SK MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERESMIAN PAW ANGGOTA DPRD PROVINSI YANG TELAH DITANDA TANGANI MENTERI DALAM NEGERI, DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR.





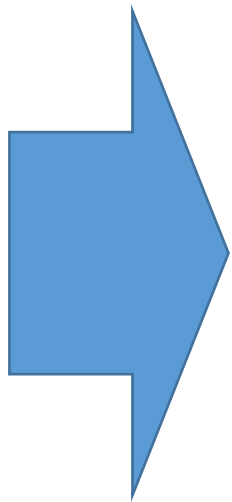
# PERSYARATAN

1. FOTOKOPI KTP;
2. FOTOKOPI IJAZAH TERAKHIR DAN STTB/
3. TRANSKRIP NILAI (LEGALISIR);
4. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN;
5. SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI;
6. SURAT TANDA BUKTI TELAH TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH;
7. SURAT PERNYATAAN TENTANG KESEDIAAN UNTUK BEKERJA PENUH WAKTU YANG DITANDATANGANI DI ATAS KERTAS BERMETERAI CUKUP;
8. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK TIDAK BERPRAKTIK SEBAGAI ANKUNTAN PUBLIK, PENGACARA, NOTARIS, PPAT DAN TIDAK MELALUKAN PEKERJAAN PENYEDIA BARANG DAN JASA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEUANGAN NEGARA SERTA PEKERJAAN LAIN YANG DAPAT MENIMBULKAN KONFLIK KEPENTINGAN DENGAN TUGAS, WEWENANG DAN HAK SEBAGAI ANGGOTA DPRD YANG DITANDATANGANI DI ATAS KERTAS BERMETERAI CUKUP;
9. SURAT PENGUNDURAN DIRI YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI SEBAGAI PNS, TNI/POLRI, PENGURUS PADA BUMN/BUMD, PENGURUS BADAN LAIN YANG ANGGARANNYA BERSUMBER DARI KEUANGAN NEGARA;

10. FOTOKOPI KARTU TANDA ANGGOTA PARPOL SERTA PEMILU;
11. SURAT PERNYATAAN TENTANG KESEDIAAN HANYA DICALONKAN OLEH 1 PARPOL UNTUK 1 LEMBAGA PERWAKILAN YANG DITANDATANGANI DI ATAS KERTAS BERMETERAI CUKUP;
12. SURAT PERNYATAAN TENTANG KESEDIAAN HANYA DICALONKAN PADA 1 DAERAH PEMILIHAN YANG DITANDATANGANI DI ATAS KERTAS BERMETERAI CUKUP;
13. USUL PEMBERHENTIAN DARI PIMPINAN PARPOL KARENA : MENINGGAL DUNIA, MENGUNDURKAN DIRI, DIUSULKAN OLEH PARPOLNYA, ATAU MENJADI ANGGOTA PARPOL LAIN; USUL PEMBERHENTIAN DARI PIMPINAN PARPOL KARENA : DINYATAKAN BERSALAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN ANCAMAN PIDANA 5 TAHUN ATAU LEBIH, DISERTA SALINAN PUTUSAN PENGADILAN;
14. USUL PEMBERHENTIAN DARI PIMPINAN PARPOL KARENA DIBERHENTIKAN SEBAGAI ANGGOTA PARPOL, DISERTA DENGAN SALINAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPERLOLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, DALAM HAL ANGGOTA PARPOL YANG BERSANGKUTAN MENGAJUKAN KEBERATAN MELALUI PENGADILAN;
15. KEPUTUSAN DAN USUL PEMBERHENTIAN DARI PIMPINAN PARPOL BERDASRAKAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD SETELAH DILAKUKAN PENYELIDIKAN DAN VERIFIKASI KARENA: (A). TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS SECARA BERKELANJUTAN ATAU BERHALANGAN TETAP SEBAGAI ANGGOTA DPRD SELAMA 3 BULAN BERTURUT-TURUT TANPA KETERANGAN APAPU; (B.) MELANGGAR SUMPAH JANJI JABATAN DAN KODE ETIK DPRD; (C.) TIDAK MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA/RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD SEBANYAK 6 KALI BERTURUT-TURUT TANPA ALASAN YANG SAH; (D). TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON ANGGOTA DPRD; ATAU (E). MELANGGAR KETENTUAN LARANGAN SEBAGAI ANGGOTA DPRD.



16. FOTOKOPI DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD PADA PEMILU YANG DILEGALISIR OLEH KPU PROVINSI  
FOTOKOPI DAFTAR PERINGKAT PEROLEHAN SUARA PARPOL YANG MENGUSULKAN PAW, DILEGALISIR  
OLEH KPU PROVINSI;
17. BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN
18. CALON PENGGANTI OLEH KPU PROVINSI SURAT/KEPUTUSAN KPU PROVINSI TENTANG NAMA CALON  
PENGGANTI ANTARWAKTU;
19. SURAT USULAN PAW DARI PIMPINAN DPRD PROVINSI KEPADA MENDAGRI MELALUI GUBERNUR;
20. SURAT USULAN PAW DARI GUBERNUR KEPADA MENDAGRI; FOTOKOPI SK PERESMIAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA DPRD YANG AKAN DIBERHENTIKAN ANTAR WAKTU;
21. SURAT KETERANGAN DARI PENGADILAN NEGERI TIDAK ADANYA SENGKETA PARTAI POLITIK



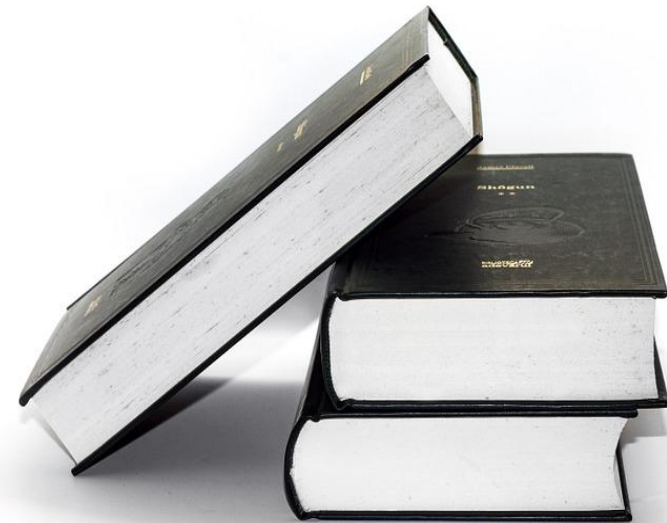
**WAKTU PENYELESAIAN**

**11 HARI KERJA  
BILA DOKUMEN  
LENGKAP**

# **PEMBERHENTIAN PENGANGKATAN BUPATI/WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA**

## **DASAR HUKUM**

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH;  
PP NO. 6/2005 TENTANG PEMILIHAN,  
PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL  
KEPALA DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN  
PP NO. 78/2012;



# PROSEDUR PENGAJUAN

1. SURAT USULAN PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KDH/WKDH OLEH GUBERNUR KEPADA MENTERI DALAM NEGERI;
2. MENTERI DALAM NEGERI CQ. DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH MENERIMA DAN MENELAAH USULAN DARI GUBERNUR, MENGENAI PENGESAHAN PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KDH/WKDH;
3. PROSES PENELAAHAN DARI ASPEK HUKUM DI BIRO HUKUM, DAN JIKA SUDAH SESUAI MAKA AKAN DILANJUTKAN UNTUK PERMOHONAN TANDA TANGAN MENTERI DALAM NEGERI; SALINAN SK PEMBERHENTIAN/PENGANGKATAN BUPATI/WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA YANG TELAH DITANDA TANGANI MENTERI DALAM NEGERI, DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR;





# PERSYARATAN

1. BERKAS PERSYARATAN PADA SAAT PENCALONAN;
2. FOTOKOPI SK PENGANGKATAN KDH/WKDH PERIODE SEBELUMNYA;
3. FOTOKOPI BERITA ACARA PELANTIKAN KDH/ WKDH PERIODE SEBELUMNYA;
4. KEPUTUSAN KPUD TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA;
5. KEPUTUSAN KPUD TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH;
6. SURAT MAHKAMAH KONSTITUSI RI MENGENAI TIDAK TERDAFTARNYA PERKARA TERKAIT KEBERATAN TERHADAP HASIL PEROLEHAN SUARA;
7. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI TENTANG PERSELISIHAN HASIL PILKADA BILA TERDAPAT GUGATAN DARI PASANGAN CALON LAINNYA;
8. SURAT PENYAMPAIAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH OLEH KPUD KEPADA DPRD;
9. SURAT USULAN PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KDH/WKDH OLEH DPRD KAB/KOTA KEPADA MENDAGRI MELALUI GUBERNUR
10. SURAT USULAN PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KDH/WKDH OLEH GUBERNUR KEPADA MENDAGRI.